

Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal

(Tinjauan Terhadap Penggunaan Simbol
Agama dan Etnis dalam Pilkada)

Pendahuluan

Bergulirnya era reformasi di Indonesia telah membawa konsekuensi perubahan di segala aspek kehidupan, termasuk aspek politik, baik menyangkut ketatanegaraan maupun yang terkait dengan sistem kepartaian. Pada sistem kepartaian, perubahan yang menonjol adalah munculnya keterbukaan bagi masyarakat untuk pembentukan partai baru yang lebih dominan. Dominannya keberadaan lembaga kepartaian ini cukup memberi gerak bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya.¹

Mulai Juni 2005 terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam pemilihan kepada daerah, yaitu dengan diberlakukannya Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) langsung. Hal itu merupakan konsekuensi dari perubahan sistem Pemilu di Indonesia, yang semakin memberikan perluasan hak rakyat dalam memilih para wakil dan pemimpin mereka. Pemberlakuan sistem proporsional dengan daftar terbuka dalam Pemilu DPR dan DPRD tidak saja telah memberikan kebebasan rakyat untuk memilih Partai Politik (Parpol) yang diinginkan, namun sekaligus secara langsung memilih calon DPR/DPRD. Sementara Pemilu DPD dengan sistem distrik berwakil banyak memungkinkan bagi rakyat untuk langsung memilih calon yang diinginkan. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung juga memungkinkan bagi rakyat untuk secara langsung memilih Presiden dan Wakil

Oleh : Hasbullah

The party of democracy (Pilkada) have role which potential baffle, because result and process of the implementation will give impact to adult education of society politics and development in autonomous era. At one side, direct Pilkada earn more is drawing near of candidate with all its elector as well as can grow the spirit of and tradition democratize until to undertow. On the other side, direct Pilkada also can exploit local strength in reaching for victory in local political stage. As nation which is plural, issue of primordial - religion and is ethnic - not yet earned to be overruled. More than anything else all elector of this nation still pertained traditional elector. All local political elite always exploit religion symbols and ethnical in execution of campaign and reach for sympathy of elector. The candidate also consider religion and ethnicity in chosening its couple candidate, because from some result of study show brotherhood tying and network of family is also made as society preference in chosening.

Keyword : Pilkada, Agama dan Etnis

Presiden yang diinginkan.

Setelah diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Artinya, proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang selama ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengalami perombakan. Karena itu, siapa yang akan menjadi gubernur dan bupati/walikota akan ditentukan sendiri oleh rakyat di daerahnya².

Munculnya Pilkada langsung ini merupakan proses perkembangan demokrasi dan demokratisasi di tanah air yang cukup menggembirakan. Melalui pelaksanaan otonomi daerah, Pilkada dijadikan sebagai media untuk mendesentralisasikan sistem demokrasi. Pilkada langsung diharapkan akan menggairahkan dan merangsang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang mendukung proses demokrasi di daerah. Melalui Pilkada langsung, diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang memiliki komitmen politik dengan segenap rakyat pemilih, serta mampu melakukan terobosan baru untuk membangun daerah.

Melalui Pilkada langsung, pemerintahan di tingkat lokal akan semakin dekat dengan rakyat, sekaligus akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi dari rakyat untuk pemerintahan lokal. Maka dengan demikian akan tercipta suatu *responsiveness* yang baik, misalnya rakyat menjadi semakin kritis dalam merespon kebijakan di tingkat lokal. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pilkada langsung merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif serta terbangunnya *political equality* (persamaan politik) di tingkat lokal.

Realitasnya, fenomena Pilkada tidak hanya bisa dipandang sebagai proses *elektoral* semata, akan tetapi juga merupakan proses politik yang meletakkan demokrasi sebagai asas perjuangan. Otoritas primordial menjadi alat jitu dalam mempengaruhi rakyat dalam proses politik. Hal ini menjadi salah satu pintu untuk membangun kekuatan para calon

kepala daerah untuk membangun imajinasi politik atas nama suku, agama, ras, dan agama, sehingga mampu membangkitkan emosional rakyat dalam memberikan dukungan dengan mengabaikan hal-hal yang bersifat rasional.

Fenomena pemilihan kepala daerah (Pilkada) sering memperlihatkan penggunaan idiom-idiom primordial, seperti suku, etnis, ras dan agama ke dalam ranah politik praktis, seperti pada saat kampanye. Oleh karena itu, kompetisi dalam Pilkada tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dari masing-masing calon dalam menjual konsep dan visinya kepada rakyat yang kelak akan menjadi pelaku utama dalam pesta demokrasi. Selain kemampuan calon menjual visi dan misi, dalam menetapkan pilihannya rakyat pemilih akan memilih calon (gubernur dan bupati/walikota) dalam konteks karena persamaan ikatan primordial (suku, agama, dan ras).

Penggunaan sentimen primordial, terutama agama pada satu sisi memberikan kontribusi positif berjalannya Pilkada. Pelibatan otoritas agama (kyai, ustadz, tuan guru, pendeta, romo, bhiksu, dan lain-lain) misalnya, akan memberi pengaruh berlangsungnya Pilkada yang aman dan damai. Karena, otoritas agama sebagai figur kharismatik bagi massa pemilih akan berfungsi sebagai elemen pemersatu, baik melalui tindakan atau “fatwa” yang dikeluarkan. Namun, pada sisi lain, tak jarang pelibatan otoritas agama ataupun penggunaan idiom-idiom (simbol) agama secara berlebihan hanya akan menciptakan situasi yang kontra produktif, karena massa pemilih akan terbelah secara sosial dan politik, yang berujung pada terjadinya disparitas primordialistis, sehingga menimbulkan etnosentrisme. Bila kondisi ini dibiarkan atau tidak dikelola secara baik tidak mustahil akan mengundang konflik yang merugikan.

Perilaku Pemilih dalam Pilkada

Terdapat dua mazhab yang dominan dan masih menjadi sumber kajian yang menarik tentang *voting behaviour*, yaitu mazhab Columbia (*The Columbia School of Electoral Behaviour*) dan mazhab Michigan (*The Michigan Survei Research Centre*). Mazhab Columbia lebih menekankan pada faktor sosiologis dalam pembentukan perilaku politik seseorang, sedangkan mazhab Michigan lebih memperhatikan faktor psikologis individu dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam perkembangannya mazhab Columbia dikenal sebagai model atau pendekatan sosiologis, sedangkan mazhab Michigan dikenal sebagai model atau pendekatan psikologis³.

Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih. Penganut aliran ini berasumsi bahwasasyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berlandaskan pengelompokan sosiologis, seperti agama, kelas, status sosial, pekerjaan, umur, jenis kelamin, dan sejenisnya, dianggap mempunyai peran yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih.⁴

Pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal – seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi sosial-keagamaan, organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi, dan sebagainya – maupun pengelompokan informal – seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya – menjadi penting karena merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik. Kelompok-kelompok tersebut membentuk persepsi dan orientasi individu. Oleh karena itu, pendekatan ini beranggapan bahwa preferensi (pilihan) terhadap salah satu partai politik dipengaruhi karakteristik sosial

individu yang bersangkutan⁵. Dengan demikian, menurut pendekatan ini pola perilaku memilih seseorang dapat diramalkan sesuai dengan karakteristik sosial yang melingkupi keberadaannya. Para penganut pendekatan ini yakin akan determinasi sosial atas penentuan preferensi kepartaian seseorang.

Salah seorang pelopor pendekatan ini, Seymour Lipset memberikan perhatian khusus pada peranan karakter sosial, terutama status dan pekerjaan untuk menjelaskan perilaku memilih. Di samping itu, ia juga mengajukan sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku orang dalam menentukan keputusan pilihannya, yaitu ras (etnis), jenis kelamin, umur, status kewarganegaraan, dan partisipasi sosial.⁶ Menurut Lipset⁷, pemilihan umum adalah ekspresi dari perjuangan kelas secara demokratis, sebab partai politik pada dasarnya dibentuk berlandaskan pengelompokan kelas rendah, menengah, dan atas. Penelitian tentang voting sebagaimana dilakukan Lipset diikuti oleh Gerald Pomper⁸ dengan memfokuskan pada predisposisi sosial dan ekonomi. Sedangkan Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker⁹ lebih memfokuskan pada variabel geografis dalam mencermati perilaku memilih.

Pendekatan sosiologis selalu menekankan pengelompokan sosial sebagai faktor penentu preferensi politik. Terdapat beberapa kritik terhadap pendekatan ini, yaitu terkait masalah metodologis, bagaimana mengukur sejumlah indikator secara tepat, dan bagaimana melakukan analisis lintas negara yang tidak menutup kemungkinan konsep kelas dan pendidikan yang berbeda¹⁰. Selain itu, perilaku memilih merupakan tindakan individu dan bukan tindakan kolektif. Seseorang dapat saja dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku, tetapi tidak ada jaminan pada saat ia menentukan

pilihan tidak akan menyimpang dari norma-norma kelompoknya¹¹.

Berbeda dengan pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis lebih memfokuskan perhatiannya pada persepsi seseorang mengenai perilaku politik. Pendekatan psikologis menggunakan dan mengembangkan konsep sikap dan pemahaman politik dalam menjelaskan perilaku pemilih. Masyarakat pemilih di Amerika Serikat dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai proses dari pemahaman diri¹².

Sikap dan perilaku politik seseorang antara lain ditentukan oleh apa yang terkandung dalam dirinya sendiri, seperti idealisme, tingkat kecerdasan, faktor biologis, dan motivasi. Greenstein¹³ menyatakan bahwa sikap mempunyai tiga fungsi dalam kaitannya dengan perilaku pemilih, yaitu: *pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap suatu objek diberi berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan individu bersangkutan. *Kedua*, individu bersikap tertentu sesuai dengan keinginan individu itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dari pertahanan diri. Artinya, sikap individu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi idealisme, rasionalisasi, dan identifikasi.

Sikap dan perilaku politik individu ditentukan oleh proses pemahaman politik yang dialami sepanjang hidupnya. Pemahaman adalah proses dimana individu secara pasif menerima nilai-nilai, sikap-sikap, peranan-peranan dalam masyarakat, sekaligus secara aktif mengembangkan pola kemandirian untuk menempatkan diri dan

berperan dalam masyarakat. Sedangkan pemahaman politik menunjukkan pada proses pembentukan sikap-sikap dan pola perilaku politik serta merupakan sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya¹⁴. Pendekatan ini percaya pada apa yang disebut agen dari pemahaman politik, seperti keluarga, sekolah, teman bermain, media massa, partai politik, organisasi massa, lingkungan kerja, dan sebagainya dapat membentuk ikatan psikologis individu dengan salah satu partai atau organisasi politik tertentu. Ikatan psikologis inilah yang disebut dengan identifikasi partai, yang merupakan konsep utama dalam pendekatan psikologis¹⁵.

Riswanda Imawan¹⁶ mengajukan tiga kritik terhadap pendekatan psikologis, yaitu: *pertama*, model ini hanya menekankan pengaruh satu arah. Identifikasi terhadap partai dianggap sebagai independen variabel yang mempengaruhi isu jangka pendek, isu jangka panjang, kemudian keputusan memilih. Model ini menihilkan kemungkinan adanya pengaruh balik, misalnya dari isu jangka pendek terhadap identifikasi partai. *Kedua*, pengaruh langsung yang dikemukakan model ini, bisa saja menjadi pengaruh tidak langsung. *Ketiga*, sebagai konsekuensi dari kelemahan-kelemahan tersebut, maka identifikasi partai tidak selamanya berfungsi sebagai faktor penjelas. Faktor ini dapat pula berubah menjadi faktor yang dijelaskan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afan Gafar¹⁷ dan Kristiadi¹⁸ layak dijadikan acuan untuk menjelaskan perilaku memilih dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Variabel utama yang digunakan dalam studi Afan Gafar adalah pemilahan tiga aliran politik (santri, abangan, dan priyayi), di samping variabel lainnya, seperti identifikasi kepartaian, kepemimpinan, dan kelas

masyarakat. Studi ini dilakukan pada masyarakat desa yang relatif homogen dalam memilih partai politik. Sedangkan kajian Kristiadi mempermasalahkan perilaku memilih secara mendasar, yaitu mengapa seseorang memberikan dukungan dan akhirnya memilih partai politik tertentu. Variabel yang digunakan sebagai penjelas dalam mengamati perilaku memilih adalah tokoh penutan, identifikasi partai, struktur sosial, dan media massa. Objek yang dijadikan sasaran penelitian Kristiadi lebih luas dibandingkan dengan Afan Gafar.

Perilaku politik adalah tindakan sosial, yang hampir terlepas dari individu. Setiap orang berperan sesuai minatnya, dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan-tujuan tertentu. Maka untuk memahami perilaku politik, digunakan teori panggung. Mengacu pada pendekatan Goffman¹⁹ misalnya, “panggung” adalah “arena pertunjukan” atau “arena bermain” setiap individu pada latar (*setting*) secara fisik maupun sosial budaya. Melalui “panggung” inilah setiap individu mencoba mempresentasikan “diri” nya melalui tindakan sosial dalam bentuk *impression management*. Atau dengan kata lain, kehidupan politik adalah sebuah pementasan drama yang dikemas sebaik mungkin sebagai upaya untuk mengontrol kesan yang timbul atas diri orang lain, atau pengamatan terhadap ekspresi tindakan sosial di atas “panggung” kehidupan sosial ini. Sementara itu, panggung (sebagai latar fisik) pada dasarnya dibagi menjadi tiga unsur, yakni panggung depan (*front stage*) yang secara formal dijadikan aktor memainkan peran sosial tertentu dan merupakan representasi setiap aktor berhadapan langsung dengan publik, yang dalam hal ini diperankan oleh para politisi dan pengambil kebijakan publik. Sementara panggung belakang (*back stage*) lebih informal merupakan ruang tertutup bagi publik justru melatarbelakangi konsep pengadeganan, dan

tempat penonton (*audience*) yang secara langsung tidak terlibat dalam peristiwa pertunjukan. Mereka adalah kalangan warga pada umumnya, yang dalam kegiatan Pilkada berperan pihak yang memiliki hak pilih. Setiap pelaku tindakan sosial berusaha bertindak aktif (*performing role*) untuk menciptakan makna atas situasi yang terbaik. Ia harus menampilkan pertunjukan terbaik dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Untuk menampilkan pertunjukan yang baik, maka dibutuhkan keselarasan antara subjek pelaku yang tampak (*actors*), peralatan (*property*), dan penampilan (*acting*) di panggung.

Panggung sebagai Latar Fisik

Audience secara tak langsung menjadi stimulus peristiwa politik. **Front stage** secara formal menjadi tempat terjadinya peristiwa. Atau “Ajang Pilkada”

Back stage (secara formal tak ada hubungan dengan peristiwa, namun di wilayah inilah tersusun strategi untuk kemenangan calon pemimpin lokal)

Dengan demikian, panggung merupakan tempat setiap pelaku tindakan sosial memainkan banyak ‘peranan’ dalam kehidupan politik. Dari panggung itulah, kait-mengkait antara konsep “peranan politisi”, “penampilan simbol keagamaan”, dan “ruang personal atau kebebasan pemilih” bekerja untuk menganalisis sesuatu “presentasi diri” atau “manajemen kesan”. Bertolak dari panggung ini pula setiap individu terlihat kompleksitas interaksi-interaksi sosialnya. Victor Turner²⁰ misalnya, membangun diskusi penting untuk mengenali kehidupan sosial sebagai sebuah tampilan yang memuat imajinasi, permainan, kreativitas subjek pelaku. Hal itu, terutama berkaitan dengan makna tindakan sosial subjek pelaku bukanlah semata-mata tinjauan kognitif atas pengalaman masa lalu, sesuatu yang secara

mendasar muncul dari kompleksitas individu-individu.

Berkaca dari pengalaman Pilkada yang dilakukan di beberapa daerah Indonesia pada umumnya, setidaknya memberikan sedikit hal yang akan menjadi landasan dan catatan bagi para pelaku demokrasi yang menjadi *stakeholder* dalam proses berlangsungnya pesta demokrasi tersebut. Adapun landasan dan catatan tersebut adalah; *pertama*, pada kenyataannya masyarakat memiliki pilihan sendiri, tanpa ada kaitan dengan partai atau pergeseran loyalitas politik. Karena dalam realitas politiknya secara gamblang tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap para calon yang mau diusung partai, tetapi pada konteks agama dan etnis. Riil politik menunjukkan bahwa bekerjanya mesin politik bukanlah satu kata kunci dari suksesnya Pilkada yang berlangsung, tetapi pada konteks primordialnya para calon. *Kedua*, kompetisi dalam Pilkada secara langsung juga sangat ditentukan oleh kemampuan dari masing-masing calon dalam menjual konsep dan visinya kepada rakyat yang nantinya menjadi pelaku utama dalam pesta demokrasi, sehingga dalam memilih calon gubernur bukan dalam konteks kesamaan agama, ras, dan suku, tetapi dalam konteks komitmen akan visi dan misi yang ditawarkan. *Ketiga*, Dapat melihat sejauh mana integritas, kredibilitas, dan akseptabilitas calon yang akan bermain dikancah demokrasi tersebut. Kombinasi antara ketiga poin di atas merupakan hal yang sangat penting bagi rakyat untuk memilih gubernur yang akan menjadi pemimpin dan menjalankan roda pemerintahan²¹.

Agama dan Politik

Banyak ilmuwan sosial yang memandang bahwa agama terutama berfungsi sebagai alat untuk mengabsahkan dan melindungi

kepentingan-kepentingan politik dan kelas sosial yang telah mapan yang dilayani oleh sistem politik itu. Menurut pandangan ini, agama adalah kekuatan konservatif secara inheren, yang secara aktif meningkatkan pemeliharaan orde politik dan sosial yang telah mapan dan menetralsir setiap usaha yang signifikan untuk mengubah orde itu. Namun juga dikemukakan bahwa agama sering berfungsi sebagai panggilan berhimpun guna melakukan perubahan-perubahan besar dalam lembaga-lembaga yang telah ditetapkan. Pandangan yang kedua ini percaya bahwa agama tidak harus bersifat konservatif, dan sesungguhnya sering merupakan kekuatan yang radikal²². Hubungan antara politik dan agama muncul sebagai masalah hanya pada bangsa-bangsa yang tidak homogen secara agama. Para pemikir politik klasik seperti Aristoteles menegaskan bahwa homogenitas agama adalah suatu kondisi kestabilan politik. Apabila kepercayaan-kepercayaan yang berlawanan mengenai nilai-nilai tertinggi (*ultimate value*) masuk ke dalam arena politik, mereka mulai bertikai dan makin jauh dari kompromi²³. Lewellen²⁴ menyebutkan peran agama dalam politik dimanifestasikan terutama melalui tiga cara, yaitu; (1) pemerintahan yang secara langsung berdasarkan agama, seperti theokrasi, (2) agama dapat digunakan sebagai legitimasi elit penguasa, dan (3) agama mungkin memberikan dasar struktur, kepercayaan, dan tradisi yang dimanipulasi oleh calon penguasa.

Charles Glock dan Rodney Stark²⁵ berusaha menganalisis hubungan antara agama dan politik radikal. Salah satu bagian dari studi mereka itu difokuskan kepada hubungan antara agama dan afiliasi partai politik di Perancis. Mereka menempatkan partai-partai politik Perancis pada suatu kontinum mulai dari yang paling radikal sampai ke yang paling konservatif. Dari

politik kiri sampai ke politik kanan, mereka memperingkat partai-partai itu sebagai berikut: Komunis, Sosialis, Radikal, Poujdist, Gaullist, Petani dan Independen. Mereka kemudian menyelidiki kepercayaan keagamaan dan praktik para anggota dari berbagai partai itu. Singkatnya, yang mereka jumpai ialah adanya suatu kaitan yang sangat kuat antara konservatisme politik dengan kepercayaan dan praktik keagamaan ortodoks, dan adanya suatu antagonisme yang sebanding di antara agama ortodoks dengan politik radikal. Dalam satu studi berskala besar mengenai orientasi keagamaan dan politik para mahasiswa perguruan tinggi Amerika, kepercayaan ortodoks dan fundamentalis ternyata mempunyai korelasi yang tinggi dengan sikap konservatisme politik; sebaliknya, orang-orang yang menolak kepercayaan dan praktik keagamaan tradisional juga kuat cenderung untuk menolak berbagai posisi politik konservatif²⁶.

Perpindahan dari pandangan politik elit tradisional ke pandangan politik partisipasi massa merupakan salah satu ciri fundamental dalam proses pembangunan politik. Sejalan dengan perputaran masa, lambang-lambang, masalah-masalah, organisasi-organisasi dan pemimpin-pemimpin agama memainkan peranan penting untuk menarik kelompok massa ke dalam proses percaturan politik. Dengan istilah yang paling sederhana dapat dikatakan bahwa; di kalangan masyarakat tradisional, agama merupakan gejala massa, sedangkan percaturan politik tidak; tetapi di kalangan masyarakat transisional, agama dapat berperan sebagai sarana untuk menyadarkan massa terhadap percaturan politik.²⁷

Menurut Smith²⁸, partai politik yang berorientasi keagamaan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: komunal, berdasarkan sekte (mazhab), tradisional, dan

modern. Dua macam pertama partai tersebut berfungsi dalam masyarakat yang ditandai dengan kompetisi antarumat atau antarsekte keagamaan, dan persaingan inilah yang menjadi orientasi pokok dari partai tersebut. Perbedaan ideologi digunakan untuk mengklasifikasikan partai keagamaan yang berperan dalam masyarakat yang tidak mengalami konflik antarumat maupun sekte keagamaan, dan ini bisa berbentuk partai “tradisionalis” atau partai “modern”. Partai komunal muncul sebagai tanggapan terhadap adanya konflik laten dalam masyarakat dengan kemajemukan agamanya. Alasan utama yang mendukung keberadaan partai komunal itu sudah barang tentu adalah perlindungan terhadap kepentingan komunal (umat) masing-masing; ia bisa bervariasi dari tingkat progresif moderat dalam menanggapi masalah yang berkaitan dengan interpretasi agama masing-masing. Partai politik yang dilandasi oleh (keyakinan) sekte terdapat di Sudan. Partai politik pertama, Asyiqqa, didirikan pada tahun 1943. partai kedua yang lebih moderat, yaitu umat dibentuk atas dukungan anggota sekte Anshar. Partai tradisional terikat pada keinginan untuk mempertahankan atau melestarikan nilai dan lembaga keagamaan dalam masyarakat. Perjuangan partai untuk memperoleh kekuasaan politik dilandasi dengan pandangan sistem religio-politik ideal dari masa lampau. Beberapa di antara sekian partai tradisional tersebut dibentuk dan dikendalikan oleh tokoh fungsionaris agama, tetapi secara resmi para anggotanya berasal baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan awam, seperti PKB, PPP, dan beberapa partai bernuansa agama lainnya. Sedangkan partai politik modern yang berorientasi keagamaan di Indonesia seperti, PAN, PBB, dan beberapa partai lainnya.

Penggunaan Simbol Agama dalam Pilkada

Menurut Erwin Goodenough²⁹, “simbol adalah barang atau pola yang apa pun sebabnya, bekerja pada manusia, dan berpengaruh pada manusia, melampaui pengakuan semata-mata tentang apa yang disajikan secara harfiah dalam bentuk yang diberikan itu”. Selanjutnya, ia membedakan antara bahasa yang bersifat *denotatif*, yaitu tepat, ilmiah, harfiah, dan bahasa yang bersifat *konotatif*, yaitu tidak persis tepat, memungkinkan beragam penafsiran, dan simbol termasuk kategori yang kedua. Simbol memiliki maknanya sendiri atau nilainya sendiri dan bersama dengan ini daya kekuatannya sendiri untuk menggerakkan kita. Pendek kata, referensi yang bersifat intelektual semata-mata tidak diterima. Malahan, daya kekuatan simbol yang bersifat emotif, yang merangsang orang untuk bertindak dipandang sebagai ciri hakikinya. Menurut Dillistone³⁰, sebuah simbol dapat dipandang sebagai:

1. Sebuah kata atau barang atau objek atau tindakan atau peristiwa atau pola atau pribadi atau hal yang konkret;
2. Yang mewakili atau menggambarkan atau mengisyaratkan atau menandakan atau menyelubungi atau menyampaikan atau menggugah atau mengungkapkan atau mengingatkan atau merujuk kepada atau berdiri menggantikan atau mencorakkan atau menunjukkan atau berhubungan dengan atau bersesuaian dengan atau menerangi atau mengacu kepada atau mengambil bagian dalam atau menggelar kembali atau berkaitan dengan;
3. Sesuatu yang lebih besar atau transenden atau tertinggi atau terakhir: sebuah makna, realitas, suatu cita-cita, nilai, prestasi, kepercayaan, masyarakat, konsep, lembaga, dan suatu keadaan.

Simbol atau tanda dapat dilihat sebagai konsep-konsep yang dianggap oleh manusia sebagai pengkhasan sesuatu yang lain yang mengandung kualitas-kualitas analisis-logis atau melalui asosiasi-asosiasi dalam fikiran atau fakta. Suatu simbol menstimulasi atau membawa suatu pesan yang mendorong pemikiran atau tindakan. Charles Peirce – peletak dasar disiplin semiotik modern – mengidentifikasi tiga tipe tanda: (1) tanda ikonik yang mencerminkan objeknya dalam hal tertentu (palang salib adalah tanda ikonik, yang menyampaikan gagasan dan makna kekristenan); (2) tanda indeks yang secara fisik terkait dengan objeknya. Misalnya bendera dipasang setengah tiang berarti ada seorang penting meninggal; dan (3) simbol-simbol seperti bahasa yang berarti bagi objeknya karena ditafsirkan sedemikian melalui kesepakatan dan penggunaan. Sebagian kajian sistem simbol dan tanda memusatkan perhatian pada logika internal. Yang lain, biasanya yang tidak terkait dengan linguistik, menekankan tindakan sosial dan konteks sosial dari tanda dan simbol tersebut ketika mereka menghubungkannya dengan sistem perilaku.³¹

Antropologi simbolik memandang manusia sebagai pembawa dan produk, sebagai subjek sekaligus objek dari suatu sistem tanda dan simbol yang berlaku sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pengetahuan dan pesan-pesan. Simbol memberikan landasan bagi tindakan dan perilaku selain gagasan dan nilai-nilai. Dimana saja sistem simbol adalah pedoman bagi tindakan, sistem ini bekerja dalam konteks sosial. Konteks sosial ini memberikan suatu simbol atau tanda makna spesifik, karena suatu simbol atau tanda dapat memiliki satu makna dalam satu konteks sosial dan makna lain dalam konteks yang berbeda pula. Masyarakat adalah hasil dari perilaku dan tindakan orang-orang yang saling terjalin satu

sama lain yang menempati batas-batas dan konteks sosial yang berbeda-beda, dan kerap kali secara simultan. Konteks itu mungkin tempat, organisasi, suku bangsa, kelompok kekerabatan, institusi, usia, kelompok pekerjaan atau jenis kelamin, atau dimensi sosial lainnya yang mendefinisikan, mengatur, dan menentukan batas-batas peranan dan perilaku. Tanda dan simbol bersama-sama menentukan manusia dalam gerakannya. Dalam pandangan simbolik, kombinasi tanda, simbol, dan konteks memberikan makna dan interpretasi bagi tindakan dan perilaku manusia.³²

Pengalaman memperlihatkan, penggunaan ayat-ayat suci dalam ranah politik praktis, saat kampanye misalnya, lebih banyak ditujukan untuk kepentingan memperoleh dukungan suara, bukan untuk menjelaskan makna sesungguhnya dari ayat tersebut. Begitu pula, pemahaman agama yang diusung di wilayah politik seperti itu, adalah pemahaman agama menurut kelompok pengusung tersebut. Selanjutnya, jika kelompok politik yang mengusung pemahaman agama tersebut menang, lalu memegang kekuasaan politik, maka pemahaman agama yang dilaksanakan adalah pemahaman agama menurut mereka. Sedang, pemahaman agama yang berbeda, meskipun dari kelompok agama yang sama, akan merasa ruang geraknya menjadi sempit. Tidak mustahil bila kelompok politik yang mengusung isu agama untuk meraih kekuasaan berkecenderungan tidak toleran terhadap pemahaman yang berbeda.

Pada tataran aksi, penggunaan agama juga ditampakkan pada meningkatnya kunjungan silaturahmi bernuansa politik dari tokoh parpol atau calon kepala daerah ke berbagai komunitas keagamaan, seperti pondok-pondok pesantren, atau tokoh-tokoh keagamaan tradisional. Digunakannya even-even agama yang sebenarnya netral (seperti kotbah Jumat atau forum majelis

taklim) untuk kampanye tidak langsung. Atau, penyelenggaraan even agama secara terbuka dan luas sebagai media kampanye terselubung, seperti doa bersama, istigotsah, dan lain-lain. Penggunaan isu agama sebatas atau disederhanakan hanya pada tataran simbol atau slogan, jelas tidak mencerdaskan rakyat pemilih dan tidak memiliki kontribusi apapun bagi umat. Padahal, semestinya agama harus dijadikan sebagai instrumen solutif berbagai masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat. Pada sisi lain, wacana politik dan juga praktik politik yang dibangun atas isu-isu perbedaan agama yang bersifat simbolik hanya akan mengantarkan pada perdebatan fanatisme antar kelompok agama dan keagamaan, yang apabila ditarik pada konstruk Pilkada, akan mudah terjebak ke dalam eksklusivisme. Sebabnya, Pilkada telah menempatkan komunitas agama tertentu sebagai identitas terpisah dari identitas lainnya.

Kecenderungan memobilisasi umat beragama dalam proses sosial politik merupakan kenyataan yang selalu terjadi dan dipandang cukup efektif untuk pertukaran kepentingan politik antarpihak. Pertemuan antartokoh agama dan politisi, kunjungan ke kantung-kantung basis umat, perhelatan-perhelatan massa, dan berbagai bentuk mobilisasi lainnya dengan memakai idiom-idiom, simbol-simbol, dan logika keagamaan, dapat disaksikan terutama dalam momentum-momentum politik penting seperti menjelang Pemilu. Kecenderungan mobilisasi umat beragama itu memang wajar dalam proses politik dimana pun, lebih-lebih dalam masyarakat di Tanah Air kita yang masih tergolong relatif kuat dalam memeluk agama. Tetapi, proses politik yang demikian menjadi suatu agenda sekaligus memunculkan dilema dalam makna serta fungsi keberagamaan di kalangan umat beragama itu sendiri. *Pertama*, seberapa jauh persentuhan agama dengan politik itu tidak

menggiring umat beragama pada perebutan-perebutan kepentingan politik jangka pendek dan merangsang ketegangan-ketegangan antarumat beragama dalam kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan misi luhur agama-agama. *Kedua*, bagaimana pesan luhur agama dapat

menjadi faktor kendali dan memberi makna moralitas dalam proses politik sebagaimana sering dijadikan alasan pembenar ketika umat beragama dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan mobilisasi untuk sebuah pertukaran kepentingan politik atas nama agama.

Politik Etnis dalam Pilkada

Perubahan sistem Pemilu dengan memberikan perluasan hak politik rakyat untuk secara langsung memilih para kandidat tersebut memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pemilih. Ketika rakyat secara langsung dapat memilih nama calon, maka sentimen dan fanatisme personal pada tokoh-tokoh atau kandidat-kandidat tertentu sangat mewarnai perilaku pemilih. Hal itu karena dalam budaya politik di Indonesia masih lekat dengan budaya politik "kaula". Fenomena budaya politik "kaula" ini tidak hanya terjadi di institusi politik saja, tetapi juga terlihat dengan jelas pada institusi-institusi lainnya, bahkan juga sudah merasuki institusi pendidikan yang bergerak di bidang akademik.

Keterlibatan langsung masyarakat ini mengakibatkan peran etnis semakin besar dalam proses perpolitikan. Para kandidat akan memainkan faktor etnisitas sebagai media untuk memenangkan pemilihan, baik untuk Pilkada Gubernur maupun untuk Pilkada Bupati dan Walikota. Etnisitas dan agama bagi bangsa ini merupakan faktor hal primordial dan sering digunakan sebagai alat penguasaan politik. Kentalnya persoalan etnisitas dalam

proses Pilkada di Indonesia terlihat dengan jelas dari kombinasi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota. Di samping itu, persoalan putra daerah juga menjadi isu yang menarik dalam proses Pilkada. Para calon berupaya merekrut pasangannya dari kelompok etnis yang mayoritas pada daerah tersebut. Hal ini wajar saja, karena merupakan strategi untuk memenangkan pertarungan tersebut. Apa yang kita lihat dengan munculnya persoalan etnisitas dalam proses Pilkada merupakan suatu fenomena kecenderungan masyarakat kita dalam memilih calon pemimpin yang berasal dari kelompoknya, dan tidak jarang terlepas dari persoalan visi dan misi serta kualitas calon itu sendiri.³³

Joseph Rothschild³⁴ menegaskan bahwa pada saat sekarang ini tidak ada satu tipe masyarakatpun atau sistem politik apapun yang terbebas dari tekanan dan kesombongan politik etnis. Hal ini lebih jauh akan memberikan dampak terhadap legitimet atau tidak legitimetnya suatu sistem, negara, rezim, dan pemerintahan, serta pada saat yang sama juga menjadi alat yang efektif untuk melakukan tekanan demi kepentingan duniawi dalam persaingan masyarakat untuk memperoleh kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan. Artinya politik etnis dapat berpotensi terjadinya konflik sosial pada suatu daerah. Fenomena ini terlihat dengan jelas dari beberapa daerah di Indonesia yang telah melaksanakan Pilkada dan munculnya konflik politik yang tidak jarang berujung kepada anarkisme. Rothschild menjelaskan politik etnis dimaksudkan sebagai tuntutan personal (seseorang) untuk menunjukkan dan masuk ke dalam kelompok yang meminta kehormatan dan kekuasaan. Secara simultan, politik etnis akan memberikan suatu instrumen publik secara langsung untuk mengefektifkan kekuatan psiko-kultural etnisitas. Lebih lanjut dijelaskan tentang langkah-

langkah politisasi etnisitas sebagai berikut; (1) menumbuhkan kesadaran warganya secara kognitif tentang relevansi politik terhadap kesejahteraan budaya etnis dan sebaliknya, (2) menstimulasi perhatian warganya tentang pentingnya hal ini bagi kelompok mereka, (3) memobilisasi mereka ke dalam kesadaran kelompok etnis, dan (4) melibatkan mereka secara langsung dalam aktivitas politik yang didasarkan kepada kesadaran, perhatian dan rasa memiliki terhadap kelompok tersebut.³⁵

Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang plural, tentu saja tidak dapat mengabaikan persoalan etnisitas. Etnisitas dijadikan sebagai salah satu item dalam pencapaian tujuan merupakan fenomena sosial yang tak terbantahkan, tapi jangan sampai persoalan etnisitas mengorbankan kepentingan kelompok lain, apalagi menghambat terwujudnya kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jika hal ini diabaikan, maka yang akan terjadi adalah konflik politik yang didasarkan kepada etnisitas.

Alfitra Salam³⁶ juga mencatat bagaimana peran etnis dan persaudaraan dalam proses pelaksanaan politik di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Ikatan tali persaudaraan menjadi salah satu preferensi bagi masyarakat daerah ini dalam menentukan pilihan. Hal ini bermakna bahwa calon yang memiliki jaringan sosial dan kekeluargaan yang luas di daerah akan sangat berpeluang untuk memenangkan pertarungan di pentas politik lokal. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai belahan kabupaten dan kota lain di negeri ini, sebut saja Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Bengkalis, Pelalawan, dan sebagainya.

Kesimpulan

Tujuan utama dari pemilihan langsung, baik kepala negara dan pemerintahan pusat maupun daerah, adalah agar pemerintahan yang terbentuk mendapat legitimasi yang utuh

dari rakyat, dan bukannya merupakan hasil dari kompromi elite semata. Kepala pemerintahan yang terpilih secara otomatis akan sesuai dengan keinginan/aspirasi masyarakat. Selain itu, kepala pemerintahan yang baru juga bisa lebih percaya diri dalam menjalankan pemerintahannya karena tidak akan mudah digoyang oleh parlemen maupun kekuatan ekstraparlemen.

Digelarnya model pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung membawa dampak serius terhadap perilaku politik elit agama di tingkat lokal. Para aktor politik lokal tiba-tiba mendapatkan arena bermain cukup luas untuk menyalurkan bakat politik mereka secara bebas. Tentu masih banyak yang teragap dengan perubahan ini, termasuk para elit agama yang relatif belum siap mensikapi terbukanya kesempatan ini. Tampilnya para kandidat calon kepala daerah di arena Pilkada langsung, pada akhirnya harus menyeret berbagai kekuatan elit lokal yang memiliki basis massa yang kuat. Organisasi

keagamaan menjadi ladang potensial untuk direbutkan para kandidat kepala daerah (Bupati, Walikota, maupun Gubernur).

Sebagai bangsa yang plural pemanfaatan isu primordial – agama dan etnis – selalu dimanfaatkan oleh elit politik dalam memenangkan pertarungan di pentas politik, seperti dalam Pilkada Bupati/Walikota dan Gubernur. Isu-isu agama dan etnis senantiasa didengungkan untuk mendapat simpati dari calon pemilih. Hal ini dimungkinkan untuk dilakukan karena para pemilih di negeri ini sebagian besar masih tergolong pemilih yang tradisional. Hal ini terlihat dengan jelas dari fenomena Pilkada yang telah dilakukan di negeri ini dimana masih dipakainya sentimen agama atau pemanfaatan simbol-simbol agama dalam kampanye.

Dalam realitasnya, otoritas primordial – agama dan etnis – mempunyai pengaruh yang

urgensi dalam berlangsungnya Pilkada yang aman dan damai. Karena pada dasarnya otoritas ini dibangun dengan cara-cara yang tidak rasional dan demokratis, sehingga bukan hanya sebuah proses pembodohan politik rakyat, tetapi juga dapat memancing suatu konflik yang akan merugikan kita semua. Mainstream yang disketsa menjadi penyebab konflik dengan perbedaan suku, agama, struktur pemerintah yang pincang dalam status kekuasaan, serta marjinalisasi akan etnis dan agama yang berujung pada disparitas primordialistis, sehingga menimbulkan etnosentrisme. Paradigma politik seperti ini dapat memberikan perspektif para calon gubernur, walikota dan bupati akan integritas politik bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai proses demokrasi.

Endnotes

- ¹ Suharyanto, "Partai Politik Islam dalam Kehidupan Politik Nasional (Studi Kasus di Provinsi DIY), dalam Jurnal *Penelitian Agama*, Vol. 12 No. 2, Mei – Agustus 2003, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 200.
- ² Andi Yusran, *Dinamika Politik Riau: dari Merdeka ke Otsus*, (Pekanbaru: ReD PoST Publishing, 2007), hlm. 122-126.
- ³ Abror Sodik, "Perilaku Memilih Warga NU Pada Pemilu 1999 di Kampung Milangi Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman", dalam Jurnal *Penelitian Agama*, Vol. 12 No. 2, Mei – Agustus 2003, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 186.
- ⁴ Riswanda Imawan, "Analisis Hasil Pemilihan Umum 1992 di Indonesia", Laporan Penelitian, (Yogyakarta: UGM, 1993), hlm. 9.
- ⁵ Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, (Yogyakarta: UGM, 1992), hlm. 5.
- ⁶ Riswanda Imawan, *Loc. Cit.*
- ⁷ Seymour Martin Lipset, *Political Man: The Social Bases of Politics*, (New York: Doubleday & Company Inc, 1960), hlm. 30.
- ⁸ Gerald Pomper, *Votre's Choice: Varieties of American Electoral Behaviour*, (New York: Doad Mead Company, 1975).
- ⁹ Arnold K. Sherman & Aliza Kolker, *The Social Bases of Politics*, (California: Devision of Warswath, 1986).
- ¹⁰ Afan Gaffar, *Op. Cit.*, hlm. 7.
- ¹¹ Riswanda Imawan, *Op. Cit.*, hlm. 10-11.
- ¹² Afan Gaffar, *Loc. Cit.*
- ¹³ Fred J. Greenstein, "Personality and Politics", dalam Fred J. Greenstein & Nilson W. Polsby, *Micro Political Theory – Hand Book of Political Science Vol. 2*, (Addision – Wesley Publishing Company, 1975), hlm. 8.
- ¹⁴ Gabriel A. Almond (ed.), *Comparative Politics Today*, (Boston: Little Brown and Co., 1974), hlm. 44.
- ¹⁵ Moshe M. Czudnowski, *Political Socialization*, (Boston: Little Brown and Co., 1977), hlm. 76.
- ¹⁶ Riswanda Imawan, *Op. Cit.*, hlm. 14-15.
- ¹⁷ Afan Gaffar, *Op. Cit.*
- ¹⁸ Kristiadi, *Pemilihan Umum dan Perilaku Memilih di Indonesia*, (Jakarta: Prisma 3 LP3ES, 1996).
- ¹⁹ Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*, (New York: 1969).
- ²⁰ Victor Tuner, 1974 *Dramas, Field, and Metaphors*, (New York: Cronell University Press, 1974).
- ²¹ Andri Froniko, "Otoritas Agama dan Etnis dalam Pilkada", Internet, 24 Agustus 2008.
- ²² Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 528.
- ²³ L. Webb. "Churches and Australian Community", dalam E.D. French (ed.). *Melbourne Studies in Education 1958-1959*, Melbourne University Press, 1960; L. Webb, *Politics and Polity*, (Auatralian National University Lecture, 1960).
- ²⁴ Ted. C. Lewellen, *Political Anthropology an Introduction*, (Massachusetts: Bergin & Garvey Publisher, Inc., 1983), hlm. 66.
- ²⁵ Charles Y. Glock & Rodney Stark, *Religion and Society in Tension*, (Chicago: Rand McNally, 1965).
- ²⁶ Stephen K. Sanderson, *Op. Cit.*
- ²⁷ Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 163.
- ²⁸ *Ibid.*, hlm. 178-187.
- ²⁹ Erwin Goodenough, *Jewish Symbols in the Graeco-Roman Period Jilid 4*, (New York: Pantheon Press, 1953), hlm. 28.
- ³⁰ F.W. Dillistone, *The Power of Symbols* (terjemahan), (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 200-221.
- ³¹ Dalam Achmad F. Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 291.
- ³² *Ibid.*, hlm. 291-294.
- ³³ Hasbullah, "Pilkada dan Politik Etnisitas", *Riau Pos*, tanggal 21 Juni 2006.
- ³⁴ Joseph Rothschild, *Etnhnopolitics A Conceptual Framework*, (New York: Columbia University Press, 1981), hlm. 2.

Hasbullah: Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁶ Alfitra Salam, “H. Sukarmis Elit Kampung Yang Membumi”, kata pengantar dalam Ichsan Fitra, *Pilkada dan Gejala Politik Lokal*, (Pekanbaru: Suska Press, 2007), hlm. xi-xiv.

Tentang Penulis

Hasbullah, Dosen tetap pada fakultas Ushuluddin UIN suska Riau, menyelesaikan studi Program S1 di IAIN SUSQA Pekanbaru tahun 1996, pendidikan S2 di UNPAD Bandung Tahun 2001. Saat ini sedang menyelesaikan studi S3 di Malaysia.